

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI YOGYAKARTA

THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND CONTROL TOWARDS BUDGETING PERFORMANCE OF VALUE FOR MONEY CONCEPT AT REGIONAL OWNED ENTERPRISES (BUMD) IN YOGYAKARTA

Oleh: Irna setiyanningrum
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
Irnasetiya123@gmail.com
Isroah
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016, (2) Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta tahun 2016, (3) Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016, (4) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016. Desain penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada BUMD di Yogyakarta. Pemilihan sampel melalui metode *purposive sampling* yaitu hanya pegawai bidang akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal saja. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016 dengan nilai Sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} 12,734 > t_{tabel} 1,663$, (2) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016 dengan nilai Sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan $t_{hitung} 9,410 > t_{tabel} 1,663$, (3) Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016 dengan nilai Sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) dengan $t_{hitung} 9,992 > t_{tabel} 1,663$, (4) Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016 dengan nilai Sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan $F_{hitung} 61,864 > F_{tabel} 3,16$.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016

Abstract

This research aims to determine (1) The influence of Accountability towards Budgeting Performance of Value for Money Concept at Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta in 2016, (2) The influence of Transparency towards Budgeting Performance of Value for Money Concept at Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta in 2016, (3) The influence of Control towards Budgeting Performance of Value for Money Concept at Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta in 2016, (4) The influence of Accountability, Transparency and Control towards Budgeting Performance of Value for Money Concept at Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta in 2016. This research type was causal associative. Population of this research was all employees of Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta. Sampling method used purposive sampling which focused on those employees of the accounting and internal control system. Method of data collection used questionnaire. The analysis technique used was simple regression analysis, and multiple regression analysis. The results show that (1) Accountability influence positive and significant towards Budgeting Performance of Value for Money Concept at Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta in 2016 as shown by Sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) and $t_{count} 12,734 > t_{table} 1,663$, (2) Transparency influence positive and significant towards Budgeting Performance of Value for Money Concept at Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta in 2016 as shown by Sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) and $t_{count} 9,410 > t_{table} 1,663$, (3) Control influence positive and significant towards Budgeting Performance of Value for Money Concept at Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta in 2016 as shown by Sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) and $t_{count} 9,992 > t_{table} 1,663$, (4) Accountability, Transparency and Control influence positive and significant towards Budgeting Performance of Value for Money Concept at Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta in 2016 as shown by Sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) and $F_{count} 61,864 > F_{table} 3,16$.

Keywords: *Accountability, Transparency, Control, Budgeting Performance of Value for Money Concept at Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta in 2016*

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, propinsi, dan daerah, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, dan menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Sejalan dengan adanya otonomi daerah maka timbul konsekuensi logis berupa tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan praktik keuangan yang sehat (*good governance*). Keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga anggaran perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti diatur dalam Undang-Undang No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah. Secara umum pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun fakta menunjukkan bahwa sebagian besar BUMD di Indonesia masih memiliki kinerja yang memprihatinkan.

Kasus yang menunjukkan fakta tersebut yaitu BUMD yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih memiliki kontribusi yang minim terhadap Pendapatan Asli Daerah. Padahal suntikan dana melalui APBD terus diberikan. Di Pemda DIY ada Perusahaan Daerah (PD) Taru Martani, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan Badan Pembangunan Daerah (BPD) yang diharapkan menyeter PAD. Namun dari BUMD tersebut, dua diantaranya kini dilanda krisis finansial, kondisi paling parah terjadi pada PT AMI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APBD DIY menyebutkan dalam rentang 2008-2011 perusahaan ini hanya sekali menyumbang PAD senilai Rp 123 juta. Padahal total

penyertaan modal dari APBD yang telah digelontorkan perusahaan dari tahun 2004 hingga 2013 mencapai Rp15,6 miliar. Bahkan lebih parah lagi, perusahaan ini justru terkena perkara hukum. Bermula dari penyertaan modal senilai Rp 6,3 miliar pada tahun 2005, bukannya memperkuat korporasi, justru pada tahun 2006 PT AMI merugi miliaran rupiah sehingga penyertaan anggaran dipandang tak tepat sasaran (www.harianjogja.com).

Selain kinerja yang buruk, BUMD juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kecurangan dan inefisiensi. Sejak tahun 2004 tercatat PDAM Tirta Bhagasasi di Bekasi Jawa Barat banyak terindikasi dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Direktur Usaha. Diantaranya, kerjasama PDAM dengan PT Moya yang merupakan kerjasama koruptif yang tidak memiliki signifikansi dengan perbaikan layanan. Dalam laporan temuan dari LHP BPK ditemukan penyimpangan dana sebesar Rp 8 miliar. Selain itu pada tahun 2015 perusahaan ini kembali melakukan tindakan penyelewengan. PDAM Tirta Bhagasasi meminta anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk penyediaan air bersih di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi. Diduga lima persen dari dana tersebut diberikan ke anggota DPRD sebagai upeti karena sudah dilancarkan permohonan

permintaan anggaran tersebut (www.reaksibekasi.com).

Adanya kasus-kasus seperti di atas menunjukkan jika manajemen BUMD belum dikelola dengan baik karena belum berjalannya fungsi perencanaan dan pengendalian dan masih belum dipahaminya prinsip transparansi dan akuntabilitas. BUMD merupakan badan usaha milik daerah yang tujuan pembentukannya salah satunya adalah melayani kepentingan masyarakat atau publik. Hal ini menandakan bahwa sudah seharusnya BUMD melaksanakan prinsip akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran, adapun wujud dari ketiga prinsip tersebut adalah dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan anggaran harus akuntabilitas dan transparansi, mengingat salah satu elemen penting dari perwujudan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pengelolaan anggaran yang baik.

Agar pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran maka dibutuhkan pengawasan dari atasan secara langsung dan badan legislatif serta lembaga pengawas yang khusus dibentuk untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Adanya pengawasan akan membuat perencanaan anggaran yang disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Menurut Mardiasmo (2002: 4), “*Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas”. Penggunaan prinsip *Value for Money* dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki anggaran sektor publik. Adanya beberapa kasus pengelolaan anggaran yang kurang baik, menandakan bahwa dalam pelaksanaan penganggaran di sektor publik harus didasarkan pada pelaksanaan akuntabilitas, transparansi dan prinsip *Value for Money*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rezky Mulya Anugriani pada tahun 2014. Faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada BUMD di Yogyakarta, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di instansi pemerintah Kabupaten Bone yang merupakan organisasi sektor publik. Selain itu pada penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap karyawan bidang akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal (SPI), sedangkan penelitian sebelumnya

memfokuskan penelitian pada kepala dinas dan bendahara di instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2013: 37), “Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih”. Pada penelitian ini menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan empat variabel yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value For Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMD di Yogyakarta, yang meliputi wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Waktu penelitian bulan September sampai Oktober 2016.

Definisi Operasional

Variabel Independen

Akuntabilitas (X₁)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang

berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Akuntabilitas dapat diukur melalui lima indikator yaitu (1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis tersedia bagi *stakeholder* yang membutuhkan, setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, (2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, (3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan, (4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, (5) Sistem informasi manajemen dana monitoring hasil (Loina Lalolo Krina P:2003).

Transparansi (X₂)

Transparansi merupakan adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dapat diukur melalui empat indikator yaitu (1) ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, (2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, (3) Adanya audit yang independen dan efektif, dan (4) Adanya keterlibatan masyarakat

dalam pembuatan keputusan anggaran (Nico Ardianto 2007: 21).

Pengawasan (X₃)

Pengawasan adalah suatu proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas pemerintahan dengan tujuan agar aktivitas tersebut dapat berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dapat diukur melalui tiga indikator yaitu (1) *Input* (masukan) pengawasan, (2) Proses pengawasan, (3) *Output* (keluaran) pengawasan (Gaspersz, 1998:287) dalam Rezky Mulya Anugriani (2014).

Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2011: 39), “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Kinerja adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk mengestimasi kinerja di masa yang akan datang selama satu tahun. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas.

Sehingga kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil (*output*) yang didasarkan pada tiga prinsip yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. *Value for Money* dapat diukur melalui dua indikator yaitu (1) Alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), (2) Kualitas pelayanan (efektivitas) (Mardiasmo, 2002: 130).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada BUMD di Yogyakarta yang berjumlah 828 orang. Pemilihan Sampel menggunakan teknik *purposive* sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai bidang Akuntansi dan Pegawai bidang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berjumlah 60 orang.

Uji Coba Instrumen

Uji Validitas

Dalam menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA).

Tabel 1. Pengujian Validitas

Varabel	KMO and Bartlett's Test	Keterangan
AK	0,763	Valid
TR	0,781	Valid
PE	0,840	Valid
AK	0,778	Valid

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas untuk Akuntabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,712	0,761	9

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas untuk Transparansi

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,800	0,824	9

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas untuk Pengawasan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,843	0,847	9

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas untuk Kinerja Anggaran

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,863	0,876	11

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua data reliabel karena nilai *cronbach's alpha* > 0,70.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF) (Imam Ghozali, 2011: 105).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya kejadian ketidaksamaan *variance* dari residual satu (Imam Ghozali, 2011: 139). Penelitian ini menggunakan grafik plot untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Imam Ghozali, 2011: 160). Penelitian ini menggunakan analisis grafik dan *one sampel kolmogorov smirnov test*.

Uji Lineritas

Uji lineritas digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak, dan fungsi yang digunakan dalam studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. (Imam Ghozali, 2011: 169). Pada

penelitian ini menggunakan uji lagrange multiplier.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Sederhana

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana

\hat{Y} = Kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*.

a = Harga Y ketika harga $X = 0$ (harga konstan).

b = Koefisien regresi.

X = Akuntabilitas atau Transparansi atau Pengawasan.

(Sugiyono, 2012: 261).

Analisis Regresi Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Kinerja Anggaran dengan

konsep *Value for Money*

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Pengawasan

a = Harga Y ketika harga $X = 0$

(harga konstan).

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*) (Imam Ghozali, 2011: 98).

Uji Statistik t

Uji Statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2011: 98).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Data

Tabel 6. Karakteristik Data

No	Kuesioner yang Disebar	Kuesioner yang Kembali
1	60	58
Tingkat pengembalian = $(58/60 \times 100\%) = 96,67\%$		

Statistik Deskriptif Responden

Tabel 7. Karakteristik Responden

Jumlah sampel		Frekuensi	Presentase
		58	100%
Jenis Kelamin	Laki-laki	20	34,48%
	Perempuan	38	65,52%
Usia	20-30	24	41,38%
	31-40	19	32,76%
	41-50	13	22,41%
	>50	2	3,45%
Pendidikan terakhir	SMA	12	20,69%
	Diploma 3	3	5,17%
	S1	41	70,69%
	S2	2	3,45%

Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas

Tabel 8. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas (X_1)

Skala	Frekuensi	Presentase
1 = Sangat Tidak Setuju	14	2,68%
2 = Tidak Setuju	32	6,13%
3 = Netral	63	12,07%
4 = Setuju	263	50,38%
5 = Sangat Setuju	92	17,62%
5 = Sangat Tidak Setuju*	8	1,53%
4 = Tidak Setuju*	23	4,41%
3 = Netral*	8	1,53%
2 = Setuju*	18	3,46%
1 = Sangat Setuju*	1	0,19%
Total	522	100%
Rata-rata = 34,31		
Standar Deviasi = 4,374		
Keterangan: * (pernyataan negatif)		

Pada tabel 8 memperlihatkan jawaban responden atas variabel akuntabilitas (untuk pernyataan positif) sangat tidak setuju sebesar 2,68%, jawaban tidak setuju 6,13%, jawaban netral sebesar 12,07%, jawaban setuju sebesar 50,38%, jawaban sangat setuju sebesar 17,62%, sedangkan (untuk pernyataan negatif) sangat tidak setuju sebesar 1,53%, jawaban tidak setuju

4,41%, jawaban netral sebesar 1,53%, jawaban setuju sebesar 3,46%, jawaban sangat setuju sebesar 0,19%, dan rata-ratanya sebesar 34,31 dengan standar deviasi sebesar 4,374. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas pernyataan yang diberikan.

Statistik Deskriptif Variabel Transparansi

Tabel 9. Analisis Deskriptif Variabel
Transparansi (X_2)

Skala	Frekuensi	Presentase
1 = Sangat Tidak Setuju	10	1,92%
2 = Tidak Setuju	23	4,41%
3 = Netral	62	11,88%
4 = Setuju	291	55,75%
5 = Sangat Setuju	136	26,04%
Total	522	100%
Rata-rata = 35,50		
Standar Deviasi = 4,570		

Tabel 9 memperlihatkan jawaban responden atas variabel transparansi sangat tidak setuju sebesar 1,92%, jawaban tidak setuju 4,41%, jawaban netral sebesar 11,80%, jawaban setuju sebesar 55,75%, jawaban sangat setuju sebesar 26,04%, dan rata-ratanya sebesar 35,50 dengan standar deviasi sebesar 4,570. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas pernyataan yang diberikan.

Statistik Deskriptif Variabel Pengawasan

Tabel 10. Analisis Deskriptif Variabel
Pengawasan (X_3)

Skala	Frekuensi	Presentase
1 = Sangat Tidak Setuju	10	1,92%
2 = Tidak Setuju	12	2,30%
3 = Netral	52	9,96%
4 = Setuju	326	62,45%
5 = Sangat Setuju	122	23,37%
Total	522	100%
Rata-rata = 36,22		
Standar Deviasi = 4,445		

Tabel 10 memperlihatkan jawaban responden atas variabel pengawasan sangat tidak setuju sebesar 1,92%, jawaban tidak setuju 2,30%, jawaban netral sebesar 9,96%, jawaban setuju sebesar 62,45%, jawaban sangat setuju sebesar 23,37%, dan rata-ratanya sebesar 36,22 dengan standar deviasi sebesar 4,445. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas pernyataan yang diberikan.

Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*

Tabel 11. Statistik Deskriptif Variabel
Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*

Skala	Frekuensi	Presentase
1 = Sangat Tidak Setuju	16	2,51%
2 = Tidak Setuju	11	1,72%
3 = Netral	61	9,56%
4 = Setuju	429	67,24%
5 = Sangat Setuju	121	18,97%
Total	638	100%
Rata-rata = 35,50		
Standar Deviasi = 4,570		

Tabel 11 memperlihatkan jawaban responden atas variabel kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* sangat tidak setuju sebesar 2,51%, jawaban tidak setuju 1,72%, jawaban netral sebesar 9,56%, jawaban setuju sebesar 67,24%, jawaban sangat setuju sebesar 18,97%, dan rata-ratanya sebesar 35,50 dengan standar deviasi sebesar 4,570. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas pernyataan yang diberikan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

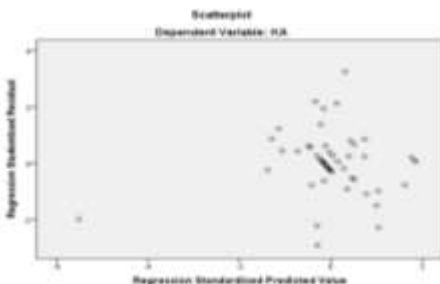
Tabel 12. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
AK	0,261	3,783
TR	0,260	3,843
PE	0,259	3,862

a. Dependent Variable: KA

Dari data di atas hasil perhitungan nilai *Tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

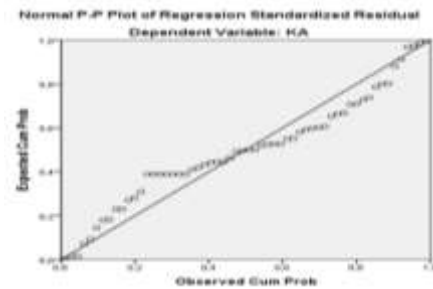


Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak

serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Tabel 13. Uji Statistik Non-Parametrik

Kolmogrov-Smirnov untuk Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^a	Mean	0E+7
	Std. Deviation	0,26561749
Most Extreme	Absolute	0,162
Differences	Positive	0,116
	Negative	-0,162
Kolmogorov-Smirnov Z		1,232
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,096

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Besarnya nilai Kolmogrov-Smirnov adalah 1,232 dan signifikan pada 0,096 > 5%. Sehingga data berdistribusi normal

Tabel 14. Uji Linearitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,880 ^a	0,775	0,762	0,27290

a. Predictors: (Constant), PE, AK, TR

Tabel 14 menunjukkan bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,775 dengan

jumlah n penelitian 58, maka besarnya nilai c^2 hitung = $58 \times 0,775 = 44,95$. Nilai ini dibandingkan dengan c^2 tabel dengan $df = 58$ dan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai c^2 tabel sebesar 76,778. c^2 hitung c^2 hitung < c^2 tabel 76,778, sehingga model regresi dalam penelitian ini berbentuk linear.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada BUMD di Yogyakarta Tahun 2016

Tabel 15. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada BUMD di Yogyakarta Tahun 2016

Nilai r		Nilai t		Sig.	Konstanta (a)	Koefisien (b)
r hitung	r ²	t hitung	t tabel			
0,862	0,743	12,734	1,663	0,000	0,651	0,851

Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,651 dan nilai t hitung 12,734 > nilai t tabel 1,663 pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,000 < 0,050) yang menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money.

Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) yang diperoleh sebesar 0,743 yang berarti bahwa Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas sebesar 74,3%. Nilai konstanta sebesar 0,651 menunjukkan bahwa jika variabel Akuntabilitas dianggap konstan, maka nilai Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money akan menjadi 0,651.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,851 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Akuntabilitas akan menaikkan nilai Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money sebesar 0,851 dan ini yang menyebabkan hubungan yang positif antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money.

Namun berdasarkan tabel 8 tentang analisis statistik deskriptif variabel akuntabilitas, masih terdapat jawaban responden yang sangat tidak setuju sebesar 2,68% dan tidak setuju sebesar 6,13% terhadap pernyataan kuesioner akuntabilitas (untuk pernyataan positif). Sebagian besar responden menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju yaitu pada pernyataan bahwa tahapan pengelolaan anggaran melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti pemodal dan pemerintah, pernyataan dalam mengevaluasi anggaran

dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi atau sesungguhnya, dan pada pernyataan anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pegawai yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap pengelolaan anggaran yang harus melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti pemodal dan pemerintah, dalam mengevaluasi anggaran dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi atau yang sesungguhnya terjadi, dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada BUMD di Yogyakarta Tahun 2016

Tabel 16. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada BUMD di Yogyakarta Tahun 2016

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
r hitung	r ²	t hitung	t tabel			
0,783	0,613	9,410	1,663	0,000	1,195	0,718

Variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money. Hal ini dapat dilihat dari nilai

koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,651 dan nilai t hitung lebih besar 9,410 > nilai t tabel 1,663 pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,050$) yang menunjukkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money. Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) yang diperoleh sebesar 0,613 yang berarti bahwa Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money dipengaruhi oleh variabel Transparansi sebesar 61,3%. Nilai konstanta sebesar 1,195 menunjukkan bahwa jika variabel Akuntabilitas dianggap konstan, maka nilai Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money akan menjadi 1,195. Nilai koefisien regresi sebesar 0,718 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Akuntabilitas akan menaikkan nilai Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money sebesar 0,718 dan ini yang menyebabkan hubungan yang positif antara Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money.

Namun berdasarkan tabel 9 tentang analisis statistik deskriptif variabel transparansi masih terdapat jawaban responden yang sangat tidak setuju sebesar 1,92% dan tidak setuju sebesar 4,41% terhadap pernyataan kuesioner transparansi. Sebagian besar responden menjawab sangat tidak setuju dan tidak

setuju yaitu pada pernyataan bahwa pemangku kepentingan (pemodal dan pemerintah) mudah untuk mengakses dokumen perusahaan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pernyataan Audit Internal melakukan audit terhadap RKAP secara independen sebelum dipublikasikan, dan pernyataan RKAP diaudit oleh BPK sebelum dipublikasikan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pegawai yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap pernyataan bahwa pemangku kepentingan (pemodal dan pemerintah) mudah untuk mengakses dokumen perusahaan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Audit Internal melakukan audit terhadap RKAP secara independen sebelum dipublikasikan, dan RKAP yang diaudit oleh BPK sebelum dipublikasikan.

Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada BUMD di Yogyakarta Tahun 2016

Tabel 17. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada BUMD di Yogyakarta Tahun 2016

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
r hitung	r ²	t hitung	t tabel			
0,800	0,641	9,992	1,663	0,000	0,980	0,787

Variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,787 dan nilai t hitung 9,992 > nilai t tabel 1,663 pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,000 < 0,050) yang menunjukkan bahwa variabel Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*. Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) yang diperoleh sebesar 0,641 yang berarti bahwa Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* dipengaruhi oleh variabel Pengawasan sebesar 64,1%. Nilai konstanta sebesar 0,980 menunjukkan bahwa jika variabel Pengawasan dianggap konstan, maka nilai Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* akan menjadi 0,980. Nilai koefisien regresi sebesar 0,787 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Akuntabilitas akan menaikkan nilai Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* sebesar 0,787 dan ini yang menyebabkan hubungan yang positif antara Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*.

Namun berdasarkan tabel 10 tentang analisis statistik deskriptif variabel pengawasan masih terdapat jawaban responden yang sangat tidak setuju sebesar

1,92% dan tidak setuju sebesar 2,30% terhadap pernyataan kuesioner pengawasan. Sebagian besar responden menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju yaitu pada pernyataan bahwa saya berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan kebijakan anggaran, pernyataan aspirasi pemangku kepentingan (pemodal dan pemerintah) menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran, dan pernyataan komite audit membantu dewan pengawas mengawasi pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pegawai yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap pernyataan bahwa karyawan bidang akuntansi dan SPI berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan kebijakan anggaran, aspirasi pemangku kepentingan (pemodal dan pemerintah) harus menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran, dan komite audit yang membantu dewan pengawas mengawasi pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada BUMD di Yogyakarta Tahun 2016

Tabel 18. Hasil Uji regresi Linear Berganda untuk Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada BUMD di Yogyakarta Tahun 2016

Variabel Independen	Nilai R		Nilai F		Sig	Konstanta (a)	Koefisien (b)
	R hitung	R ²	F hitung	F tabel			
Akuntabilitas							0,564
Transparansi	0,880	0,775	61,864	3,16	0,000	0,457	0,119
Pengawasan							0,222

Variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,564; 0,119; 0,222 dan nilai F hitung 61,864 > F tabel 3,16 pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value for Money lebih kecil daripada nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,050$) yang menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep

Value for Money. Nilai koefisien determinasi ganda (R^2) yang diperoleh sebesar 0,775 yang berarti bahwa Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan sebesar 77,5% dan 22,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nilai konstanta sebesar 0,457 menunjukkan bahwa jika variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan dianggap konstan, maka nilai Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* akan menjadi sebesar 0,457. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa hasil koefisien regresi untuk variabel Akuntabilitas sebesar 0,564; variabel Transparansi sebesar 0,119; dan variabel Pengawasan sebesar 0,222. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda yaitu:

Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* = $0,457 + 0,564 \text{ Akuntabilitas} + 0,119 \text{ Transparansi} + 0,222 \text{ Pengawasan}$.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Akuntabilitas sebesar 0,564. Hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan 1 poin Akuntabilitas, maka nilai Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* akan naik sebesar 0,564 poin dengan asumsi variabel Transparansi dan Pengawasan tetap.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Transparansi

sebesar 0,119. Hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan 1 poin Transparansi, maka nilai Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* akan naik sebesar 0,119 poin dengan asumsi variabel Akuntabilitas dan Pengawasan tetap.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Pengawasan sebesar 0,222. Hal ini berarti bahwa terjadi kenaikan 1 poin Transparansi, maka nilai Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* akan naik sebesar 0,222 poin dengan asumsi variabel Akuntabilitas dan Transparansi tetap.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,851 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($12,734 > 1,663$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$). Namun masih terdapat jawaban responden yang sangat tidak setuju dan tidak setuju yaitu sebesar 8,81% terhadap pembuatan anggaran yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti pemodal dan pemerintah, evaluasi anggaran dilakukan

dengan membandingkan target dengan realisasi, dan anggaran yang dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi.

2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,718 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($9,410 > 1,663$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$). Namun masih terdapat responden yang sangat tidak setuju dan tidak setuju yaitu sebesar 6,33% terhadap kemudahan pemangku kepentingan (pemodal dan pemerintah) untuk mengakses dokumen perusahaan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), audit internal secara independen melakukan audit terhadap RKAP yang belum diterbitkan, dan RKAP yang diaudit BPK sebelum diterbitkan.

3. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,787 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($9,992 > 1,663$) serta nilai signifikansi

yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$). Namun masih terdapat jawaban responden yaitu sebesar 4,22% yang sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap peran karyawan bidang akuntan dan SPI dalam memberikan masukan saat penyusunan kebijakan anggaran, aspirasi pemangku kepentingan (pemodal dan pemerintah) menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran, dan komite audit yang membantu dewan pengawas dalam mengawasi pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

4. Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,564; 0,119; dan 0,222 dan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ($61,864 > 3,16$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$).

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis statistik deskriptif variabel akuntabilitas, masih terdapat jawaban responden yang sangat tidak setuju sebesar 2,68% dan tidak setuju sebesar 6,13% terhadap pernyataan kuesioner

akuntabilitas yaitu pada pernyataan nomor 1, 8 dan 9. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masih terdapat pegawai yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap pernyataan pengelolaan anggaran yang harus melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti pemodal dan pemerintah, dalam mengevaluasi anggaran harus dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi atau yang sesungguhnya terjadi, dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Oleh karena itu disarankan kepada BUMD di Yogyakarta untuk meningkatkan pemahaman karyawan berkenaan dengan hal tersebut.

2. Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis statistik deskriptif variabel transparansi, masih terdapat jawaban responden yang sangat tidak setuju sebesar 1,92% dan tidak setuju sebesar 4,41% terhadap pernyataan kuesioner transparansi yaitu pada pernyataan nomor 1, 8 dan 9. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masih terdapat pegawai yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap pernyataan bahwa pemangku kepentingan (pemodal dan pemerintah) mudah untuk mengakses dokumen perusahaan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Audit Internal melakukan audit terhadap RKAP secara independen sebelum dipublikasikan,

dan RKAP diaudit oleh BPK sebelum dipublikasikan. Oleh karena itu disarankan kepada BUMD di Yogyakarta untuk meningkatkan pemahaman karyawan berkenaan dengan hal tersebut.

3. Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis statistik deskriptif variabel pengawasan, masih terdapat jawaban responden yang sangat tidak setuju sebesar 1,92% dan tidak setuju sebesar 2,30% terhadap pernyataan kuesioner pengawasan yaitu pada pernyataan nomor 1, 2, dan 7. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masih terdapat pegawai yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap pernyataan bahwa pegawai bidang akuntansi dan SPI berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan kebijakan anggaran, aspirasi pemangku kepentingan (pemodal dan pemerintah) menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran, dan komite audit membantu dewan pengawas mengawasi pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Oleh karena itu disarankan kepada BUMD di Yogyakarta untuk meningkatkan pemahaman karyawan berkenaan dengan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dan Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi pemerintah*. Vol 2.
- Bachtiar Arif. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harian Jogja. (2013). Badan Usaha Membebani Daerah. (www.harianjogja.com/baca/2013/02/1usaha-membebani-daerah-380160, diakses pada 27 Maret 2016).
- I Desak Nyoman Tri Wandiri, dkk. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Program S1*. Vol 3.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- _____. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (2001). Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 Tentang Penerapan Good Corporate Governance. (2002). Jakarta: Republik Indonesia.
- Loina Lalolo Krina P. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhammad Firdiansyah Adiwirya. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 11.2.
- Nico Andrianto. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Noor Cholis Madjid dan Hasan Ashari. (2013). *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan pendidikan dan Pelatihan keuangan.
- Peraturan Daerah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005). Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum. (2009). Kulon Progo: Republik Indonesia.

- _____. Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005). Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 Tentang Penerapan penganggaran berbasis Kinerja. (2010). Jakarta: Republik Indonesia.
- Reaksi Bekasi. (2016). Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Miliki Rekam Jejak Buruk. (www.reaksibekasi.com/index.php/2016/02/25/dirut-pdam-tirta-bhagasasi-miliki-rekam-jejak-buruk, diakses pada Hari Rabu, 11 Mei 2016).
- Resky Marcelita Yolanda Putri. (2014). Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Revrisond Baswir. (2000). *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Rezky Mulya Anugriani. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2013). *Cara Mudah Menyusun skripsi, tesis, dan disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (2003). Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Diatur Pengawasan yang Bersamaan dengan Pembinaan. (2004). Jakarta: Republik Indonesia.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. (2004). Jakarta: Republik Indonesia.